KEMAMPUAN MASYARAKAT MISKIN MEMENUHI PERSYARATAN BANTUAN STIMULAN BEDAH RUMAH

(Studi Kasus Di Desa Labuhan Makmur, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji)

(SKRIPSI)

OLEH:

IKA DESIANA

JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2016

ABSTRACT

THE ABILITY OF THE POOR PEOPLE TO COMPLETE REQUIREMENTS OF HELPING STIMULANTS SURGERY HOUSE
(Case study in Labuhan Makmur Village, Districts of Way Serdang, District of Mesuji)

By

Ika Desiana

This study aims to describe the ability of poor community to complete requirements of helping stimulants surgery house, to comphare before and after that programe held on poor people's life, analyze multiple factors that can encourage passage of the surgery house programe and how they affect the welfare of the poor people in Labuhan Makmur village, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji. Informan in this research was from poor people who could complete the requirements and the poor community who couldn't complete the requirements, as well as the relevant Department. Determination of informants used purposive. Results from this study showed that stimulant surgical program was already achieving success considering the number of poor people who get helping and completing the requirements of more than poor people who didn't able to completing the requirements, as well as the significant change of housing conditions of the poor who didn't deserve to be more feasible. This study tends to looking at the decision-support requirements set by the District Government in achieving success Mesuji stimulant surgical program by taking the number of poor people who complete the requirements.

Keywords: The poor, Surgery House, Requirements, Success

ABSTRAK

KEMAMPUAN MASYARAKAT MISKIN MEMENUHI PERSYARATAN BANTUAN STIMULAN BEDAH RUMAH
(Studi Kasus Di Desa Labuhan Makmur, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji)

Oleh

IkaDesiana

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan masyarakat miskin dalam memenuhi persyaratan bantuan stimulant bedah rumah, membandingkan sebelum dan setelah program tersebut dijalankan terhadap kehidupan masyarakat miskin, menganalisis beberapa faktor yang dapat mendorong berjalannya program tersebut dan bagaimana pengaruhnya terhadap kesejahteraan hidup masyarakat miskin di Desa Labuhan Makmur, KecamatanWay Serdang, Kabupaten Mesuji.Informan berasal dari masyarakat miskin yang memenuhi persyaratan dan tidak memenuhi persyaratan bantuan stimulan bedah rumah yang telah ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* sesuai dengan kebutuhan peneliti. Penelitian ini menunjukan bahwa program stimulant bedah rumah belum sepenuhnya mencapai keberhasilan dikarenakan ada beberapa masyarakat miskin di Desa Labuhan Makmur yang belum mendapatkan bantuan tersebut. Penelitian ini cenderung melihat pada persyaratan pengambilan bantuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Mesuji dalam pencapaian keberhasilan program stimulant bedah rumah.

Kata Kunci :masyarakat miskin, bedah rumah, persyaratan, keberhasilan

KEMAMPUAN MASYARAKAT MISKIN MEMENUHI PERSYARATAN BANTUAN STIMULAN BEDAH RUMAH

(Studi Kasus Di Desa Labuhan Makmur, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji)

OLEH:

IKA DESIANA

Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA SOSIOLOGI

Pada

Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2016

Judul Skipsi : **Kemampuan Masyarakat Miskin Memenuhi Persyaratan Stimulan Bedah rumah (studi kasus di Desa Labuhan Makmur, Kecamatan Way Serdang , Kabupaten Mesuji)**

Nama Mahasiswa : **Ika Desiana**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1216011047**

Jurusan : **Sosiologi**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Drs. Susetyo, M.Si
NIP. 19581004 198902 1 001

2. Ketua Jurusan

Drs. Susetyo, M.Si
NIP. 19581004 198902 1 001

MENGESAHKAN

1. **Tim penguji**

Ketua : **Drs. Susetyo, M.Si** .....

Penguji Utama : **Drs. Gunawan Budi Kahono** .....

2. **Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

Drs. Hi. Agus Hadiawan, M.Si.
NIP : 19580109 1918603 1 002

Tangal Lulus Ujian Skripsi : 25 April 2016

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar Akademik (Master/Sarjana/Ahli Madya), baik di Universitas Lampung maupun di PerguruanTinggi lain.

2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.

3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 21 April 2016
Yang membuat pernyataan,

METERAI TEMPEL
32DE0ABF649344348
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

Ika Desiana

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Ika Desiana dilahirkan di Desa Labuhan Baru, 04 Desember 1993.Penulis adalah anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Hadi Pranoto dan Ibu Sri Wahyuni.

Jenjang pendidikan formal yang telah penulis tempuh antara lain Sekolah Dasar (SD) di SDN 01 Labuhan Baru pada tahun 2001, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP MMT Labuhan Baru pada tahun 2006, Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAN 01 Way Serdang dan lulus pada tahun 2012.

Pada tahun 2012 penulis terdaftar sebagai mahasiswa jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung melalui jalur PMPAP.Pada tahun 2015 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada bulan Januari sampai Februari tahun 2015 di Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang.

MOTTO

Orang sukses adalah orang yang tidak pernah berpikir dirinya kalah, ketik ia terpukul jatuh (gagal) ia akan bangkit kembali, belajar dari kesalahannya dan bergerak maju menuju inovasi yang lebih baik.

(Ika Desiana)

Jangan mengaku kalah sebelum mencoba karena jika engkau mengalah sebelum mencoba maka engkaulah pecundang.

(Ika Desiana)

Berjuang untuk mendapatkan sesuatu bukan menunggu untuk mendapatkannya, karena setiap hal didunia tidak ada yang didapatkan tanpa proses panjang.

(Ika Desiana)

PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberika nikmat yang tak henti-hentinya kepada umat-Nya. Sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak. Kupersembahkan skripsi sederhana ini kepada :

- Sang Pencipta Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, kesempatan, dan kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
- Bapak dan Ibu tersayang, terimakasih untuk doa, perjuangan dan pengorbanan selama ini, yang tidak kenal lelah menjagaku, mendidikku, sampai dengan saat ini serta adik ku tercinta, Tomi Febriato, Tobi Junaidi, dan si Bungsu Alviano Vando.
- Semua keluarga besarku yang telah memberikan banyak perubahan dalam hidupku, Bapak M.Umar dan Ibu Samsiyah, Uni, Pimpin, Ane, Ridho, Nita, Ulan, Amara, Septi.
- Seseorang yang selalu mendukungku, Kakak, Kholikul makruf, terimakasih telah menjadi tempat keluh kesahku.
- Semua teman-teman Sosiologi 2012, khusunya safitri ning rahayu, silvia lazulka, laela kurnia, septini diandini, ignasia anggi semoga persahabatan ini sepanjang masa.

SANWACANA

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulilah segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang merupakan syarat mencapai gelar sarjana Sosiologi. Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Skripsi dengan judul " Kemampuan Masyarakat Miskin Memenuhi Persyaratan Bantuan Stimulan Bedah Rumah" adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosiologi di Universitas Lampung. Dalam penyelesaian skripsi ini, tentunya tidak terlepas dari peran, bantuan, bimbingan, saran, dan kritik dari berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati dan keyakinan bahwa Allah SWT yang bisa membalasnya, penulis mengucapkan terimakasih yang setulusnya kepada :

1. Bapak Drs. Agus Hadiawan , Msi. Selaku Dekan FISIP Universitas Lampung.
2. Bapak Drs. Effendi, MM. selaku Pembantu Dekan I FISIP Universitas Lampung.
3. Bapak Drs. Susetyo, Msi. Selaku Ketua Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Lampung.

4. Bapak Drs. Ikram Badila, Msi. Selaku Sekretaris Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Lampung.
5. Bapak Drs. Susetyo, Msi. Selaku Dosen Pembimbing, terimakasih ya pak atas semua bantuannya berupa saran dan kritik yang telah bapak berikan kepada saya.
6. Bapak Drs. Gunawan Budi kahono selaku Dosen Pembahas, terimakasih untuk waktunya selama ini.
7. Ibu Dra. Yuni Ratnasari, Msi. Selaku Dosen Pembimbing Akademik, terimakasih sudah menjadi PA yang selalu ada.
8. Bapak Drs. Suwarno, MH. Dosen yang sangat mengagumkan, terimakasih untuk ilmunya.
9. Ibu Dr. Bartoven Vivit Nurdin, Msi. Dosen kebanggaan, terimakasih untuk pembelajaran, serta bantuannya.
10. Bapak Teuku fahmi, Abdul Syani, Damar Wibisono, Sindung Harianto, Pairulsyah, Gede Sidemen, Hartoyo terimaksih untuk ilmu yang telah diberikan.
11. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dengan segala ketulusannya.
12. Seluruh staf bagian akademik dan kemahasiswaan, terimakasih atas semua bantuannya.
13. Teman- teman seangkatan yang selalu terkenang sepanjang masa , Ela, Wayan, Mega, Vidya, Vindi, Saeno, tere, rica, april,siska, anita wahyu, devi, hana, pipit, helma,marlia,intan, mahmud, andref, bryan, merta, onoy, dayat,

igun, ipul, eki, suhe, ruli, azrianda, agung, syerdian, panji, dan semuanya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

14. Teman KKN Adelia Ghazani, Infantri Sembiring, Fajar Fadillah, Hilda Andini Siahaan, kalian selalu terkenang dalam kebersamaan di Desa Agung Jaya, dan untuk Pak Miswanto serta buat Ryo Yuda Pratama terimakasih untuk bantuanya dilokasi KKN.

Penulis hanya bisa berdoa semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis.Semoga skripsi ini dapat bemanfaat bagi kita smua.Amin.

Bandar Lampung, 25 April 2016
Penulis

Ika Desiana
NPM 1216011047

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GAMBAR iv

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 11
C. Tujuan Penelitian 11
D. Manfaat Penelitian 12

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Program Bedah Rumah (Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni) ... 13
B. Konsep Rumah Layak Huni 21
C. Konsep Rumah Tidak Layak Huni 21
D. Pengertian Kemiskinan 22
E. Perbedaan Karakteristik Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan Bantuan Stimulan Bedah Rumah 27
F. Kerangka Pemikiran 29

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian 30
B. Fokus Penelitian 31
C. Lokasi Penelitian 32
D. Teknik Penentuan Informan 33
E. Teknik Pengumpulan Data 34
F. Teknik Analisis Data 36

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Desa Labuhan Makmur 37
B. Letak Geografis Desa Labuhan Makmur 38
C. Luas Areal Desa Labuhan Makmur 38
D. Potensi Sumber Daya Manusia 39
E. Potensi Kelembagaan 42
F. Kelembagaan Ekonomi 43
G. Prasarana Kesehatan 44

H. Ekonomi Masyarakat 44
I. Lembaga Pendidikan 47

V. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Wawancara 48
1. Profil Informan 48
2. Memenuhi Persyaratan Karena Kesiapan 50
3. Tidak bersedia memenuhi persyaratan 54
4. Rumah Yang Tidak Layak Menjadi Layak 59
5. Kendala Dalam Proses Penyaluran 61
6. Sebagian Masyarakat Miskin Memilih Mundur 63
7. Peran Gotong Royong 65
8. Solusi : Antara Berhasil Dan Tidak Berhasil 68
9. Tanggapan Pemerintah Pemerintah Kabupaten Mesuji..... 71
10. Kebersamaan Antar Warga Yang Mendapatkan Bantuan..... 72

B. Pembahasan 73
1. Alasan bersedia memenuhi persyaratan bantuan stimulan bedah rumah 74
2. Kendala-kendala penyaluran bantuan stimulan bedah rumah ... 75
3. Solusi Mengenai Kendala Dalam Proses Penyaluran Bantuan Stimulan Bedah Rumah 81
4. Kemampuan masyarakat miskin dalam memenuhi persyaratan bantuan stimulan bedah rumah 83
5. Konsep Keberhasilan Program Pembangunan..... 94
6. Peranan Pemerintah Desa 97

VI. KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan 99
B. Saran-Saran 101

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1.1. Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin 2

1.2. Jumlah Penduduk Miskindan Penerima Bantuan Stimulan di Desa Labuhan Makmur 8

4.1. Luas Areal Desa Labuhan Makmur 38

4.2. Jumlah Penduduk Usia <1 Tahun sampai >60 Tahun 39

4.3. Tingkat Pendidikan Penduduk 40

4.4. Mata Pencaharian Pokok 41

4.5. Jumlah Penduduk menurut Agama 42

4.6. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan 42

4.7. Jumlah Kelembagaan Ekonomi 43

4.8. Jumlah Prasarana Kesehatan 44

4.9. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Kemiskinan 45

4.10. Jumlah Penduduk Menurut Penguasaan Aset Ekonomi 46

4.11. Jumlah Lembaga Pendidikan 47

5.1. Profil Informan 49

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

1. Foto Wawancara Dan Kondisi Rumah Ibu Ma Setelah Di Renovasi 52
2. Foto Wawancara Dan Kondisi Rumah Bapak Da Setelah Di Renovasi .. 53
3. Foto Wawancara Dan Kondisi Rumah Bapak Tu Yang Belum Memenuhi Persyaratan 56
4. Foto wawancara dengan informanWa yang tidak mampu memenuhi persyaratan bantuan stimulan bedah rumah 57
5. Proses renovasi rumah layak huni dengan cara gotong royong 65
6. Foto wawancara serta gambaran kondisi rumah sebelum dan setelah mendapat bantuan 67
7. Foto Bupati Mesuji saat meninjau pembangunan rumah layak huni di desa Labuhan Makmur, Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji..... 70
8. Foto Tentang KekompakanMasyarakat Desa Labuhan Makmur 78

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan tarafkehidupan kelompok masyarakatnya, akan tetapi kemiskinan sering dipandang tidak tercukupinya kebutuhansandang, pangan, maupun papan Masalah kemiskinan menjadi masalah sosial yang dialami oleh penduduk Kabupaten Mesuji, berdasarkan kriteria yang digunakan oleh BPS, untuk mengukur kemiskinan bahwa kondisi rumah yang tidak layakhuni merupakan ciri utama untuk membedakan keluarga miskin dan keluarga tidak miskin.

Rumah merupakan kebutuhan dasar manusia yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. Pada hakikatnya setiap warga masyarakat membutuhkan perumahan yang layak huni, namun dalam kenyataanya pemenuhan kebutuhan rumah layak huni tersebut menjadi masalah bagi sebagian masyarakat.

Pembangunan perumahan yang tidak seimbang dengan pertumbuhan penduduk menyebabkan tidak semua masyarakat dapat terpenuhi kebutuhannya akan perumahan yang telah disediakan oleh Pemerintah.

Masyarakat miskin merupakan sekumpulan orang yang dikategorikan memiliki status sosial rendah dalam lingkungan hidupnya yangdiidentikan dengan faktor ekonomi maupun kepemilikan jumlah kekayaan.

Pada tahun 1999-2013 jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami penurunan dan juga peningkatan.Menurut peneliti, hal ini karena prrogram-program pemerintah telah berperan dengan baikdalam upaya menurunkan angka kemiskinan di Indonesia.Tabel dibawah ini memaparkan jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin dari tahun 1997-2013.

Tabel 1.1. Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin

Tahun	**Jumlah (juta orang)**	**Persentase**
1976	54.2	40.1 %
1978	47.2	33.3 %
1980	42.3	28.6%
1981	40.6	26.9 %
1984	35.00	21.6 %
1987	30.00	17.4%
1990	27.2	15.1 %
1993	25.9	13.7%
1996	22.5	11.3 %
1997	34.1	17.47%
1998	49.5	24.2%
1999	47.97	23.43%
2000	38.74	19.14%
2001	37.87	18.41%
2002	38.39	18.2%
2003	37.34	17.42%
2004	36.15	16.66%
2005	35.1	15.97%
2006	39.3	17.75%
2007	37.17	16.58%
2008	34.96	15.42%
2009	32.53	14.15%
2010	31.02	13.33%
Maret 20011	30.02	12.49%
Sep 2011	29.89	12.36%
Maret 2012	29.13	11.96%
Sep 2012	28.59	11.66%
Maret 2013	28.07	11.37%
Sep 2013	28.55	11.47%

Sumber :http://www.bps.go.id/link TabelStatis/view/id/1494

Dari tabel diatas jumlah tertinggi penduduk miskin Indonesia terjadi pada tahun 1999. Pada tahun 2013 jumlah penduduk miskin sebesar 28,55 juta jiwa, ini berarti penduduk miskin di Indonesia semakin berkurang. Program-program Pemerintah jelas membantu.Contohnya seperti Program Bedah Rumah, Program Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri).

Masalah kemiskinan perdesaan disebabkan karena rendahnya pelayanan dan kondisi insfrastruktur desa dalam mendukung pengembangan ekonomi pedesaan, produktivitas, mobilitas dandistribusi hasil-hasil produk pertanian yang merupakan bidang paling banyak digeluti oleh masyarakat desa. Tidak hanya itu, akses masyarakat desa terhadap pengambilan kebijakan pembangunan selama ini masih lemah, karena tidak memiliki koneksi yang memadai, kapasitas yang terbatas dan seterusnya.

Sementara itu, pembangunan yang dilakukan dikawasan perdesaan oleh Pemerintah daerah sering bersifat *Top Down* karena hanya mengarah pada pembangunan yang berasal dari pusat, dan kurang melakukan pembangunan yang diawali dari bawah atau dilakukan melalui tahap terkecil seperti pembangunan ditingkat desa, dalam perencanaanya hingga proses evaluasi, dimana peran masyarakat tidak begitu berpengaruh. Peran dari masyarakat hanya sebagai penerima keputusan atau hasil dari suatu program tanpa mengetahui jalannya proses pembentukan program tersebut dari awal hingga ahir.Diketahui bahwa pembangunan pedesaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, dalam pelaksanaanya pembangunan pedesaan seharusnya mengacu pada

pencapaian tujuan pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera dan berkeadilan.

Pembangunan perdesaan harus diletakan dalam konteks sebagaiupaya mempercepat pembangunan perdesaan melalui penyediaan sarana dan prasarana pembangunan untuk memberdayakan masyarakat, sebagai upaya mempercepat danmemperkokoh pembangunan ekonomi daerah dalam arti luas secara efektif dan kokoh. Rencana pembangunan daerah harus disusun berdasarkan pada potensi yang dimiliki dankondisi masyarakat yang ada sekarang.

Tujuan pembangunan pada dasarnya adalah untuk menciptakan kemajuan dibidang sosial dan ekonomi secara berkesinambungan, tanpa mengabaikan persamaan hak dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia secara keseluruhan.

Menurut Abdul Syani, (2007),keadaaan kaya dan miskin secara berdampingan tidak merupakan masalah sosial sampai saatnyaperdagangan berkembang dengan pesatdan timbulnyanilai-nilai sosial yang baru.

Secara sosiologis, salah satu sebab timbulnya kemiskinan dikarenakan tidak berfungsinya lembaga kemasyarakatan yaitu lembaga kemasyarakatan dibidang ekonomi. Kepincangan tersebut akan menjalar kebidang-bidang lainnya, seperti pada kehidupan keluarga yang tertimpa kemiskinan tersebut. Program pemberdayaan bagi masyarakat miskin merupakan salah satu usaha dalampeningkatan kesejahteraannya, berbagai program diluncurkan oleh Pemerintah dalam upaya menanggulangi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi,

baik program yang djalankan oleh Pemerintah Daerah maupun Lembaga–lembaga kemasyarakatan. Program-program itu secara spesifik disediakan melalui Anggaran Pendapatan danBelanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Program-program yang direncanakan maupun yang telah dijalankan, harus mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan taraf kehidupan masyarakat miskin khususnya terpenuhinya kebutuhan papan sebagai tempat tinggal yang layak huni serta dapat menciptakan kenyamanan dan kesejahteraannya. Program pembangunan daerah harus mengacu kepada preferensi dan kebutuhan masyarakat secara nyata. Lebih lanjut program yang diusulkan tidak boleh didasarkan pada keinginan, melainkan harus benar-benar merupakan kebutuhan dan oleh karena itu, pengusulan program perlu disusun dalam waktu yang singkat, dengan mempercepat tindakan pembangunan. Sebagai masyarakat miskin, mungkin secara tidak langsungmengharapkan bantuan dalam hal perbaikan kondisi tempat tinggalnya karena sebagai pendukung aktivitas-aktivitas sehari-hari serta tempat berkumpulnyakeluarga dalam menjalani kehidupannya. Akan tetapi semuanya tergantung dari kebijakan yang akan dijalankan oleh Pemerintah dalam menyikapi permasalahan tersebut. Karena dana anggaran cukup terbatas, sedangkan program pembangunan yang dibutuhkan relatif banyak, maka perlu dilakukan penentuan prioritas program pembangunan yang diusulkan, penentuan prioritas program pembangunan harus dilakukan berdasarkan kriteria yang terukur, serta didukung oleh partisipasi masyarakat untuk menunjang implementasi program pembangunan tersebut.

Program bantuan stimulanbedah rumah yang telah diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Mesuji terhadap perbaikan kondisi rumah yang tidak layak huni bagi masyarakat miskin khususnya di Desa Labuhan Makmur,yang secara umum rumah masyarakatnya masih papan dan geribik serta kondisinya sangat parah.Kondisiiniyang mendorong dijalankannya program bantuan stimulan bedah rumah yang berupapemberian bahan-bahan bangunan seperti semen, besi, batu splid, cat, dan lainnya sebagai bahan pokok dalamproses perbaikan rumah masyarakat miskin.

Hal ini merupakan salah satu program yang di tunggu-tunggu oleh masyarakat, dimana program tersebut yang secara langsung dapat dirasakan dan mampu merubah kondisi tempat tinggal masyarakat miskin,serta memberikan dampak yang positif bagi kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukanya evaluasi dalam penyaluran bantuan, baik yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Kabupaten,Pemerintah Kecamatan, maupun Aparatur Desa dalam memperlancar program tersebut serta ketepatan sasaran program terhadap masyarakat miskin penerima bantuan.

Pemerintah Kabupaten Mesuji melontarkan dana Rp. 40 milyar untuk membiayai program bedah rumah. Program bedah rumah dibagi menjadi dua tipe, yaitu program bedah rumah untuk desa tua dan bedah rumah non desa tua atau desa transmigrasi. Khusus untuk desa tua, warga tidak mampu akan mendapatkan bantuan Rp. 25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah), untuk membangun rumah layak huni, dan bagi warga eks transmigrasi yang rumahnya belum layak huni, sekitar 1.600 unit rumah eks transmigrasi.Meski bantuan dari Kementerian

Sosial(RI) tersebut telah turun kedaerah, namun ada beberapa kendala yang terjadi dikarenakan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mesuji Surizal Zikri belum sepenuhnya menyalurkan dana bantuan tersebut kepada masyarakat. Pertimbangan yang dilakukan karena bantuan bedah rumah yang dicanangkan oleh Kemensos RI untuk warga mesuji kurang singkron dengan program bedah rumah yang direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten Mesuji melalui dana APBD.

Program bedah rumah yang berasal dari pusat intinya hanya membedah, atau dengan kata lain hanya merenovasi atau memperbaiki yang rusak saja, tetapi program bedah rumah dari daerah membangun kembali rumah dengan cara swadaya dengan mengkombinasikan program rehabilitasi rumah dengan menumbuhkan semangat gotong royong.Menurut pendataan Pemerintah Kabupaten Mesuji, terdapat 12.860 rumah tidak layak huni di Kabupaten Mesuji sebanyak 1.357 diantaranya sudah diikutsertakan dalam program bedah rumah tahun sebelumnya, untuk Kecamatan Way Serdang jumlah penduduknya 40.928 jiwa dan mendapatkan bantuan stimulan bedah rumah 900 unit. Untuk Desa Labuhan Makmur hanya mendapatkan 80 unit bantuan stimulan bedah rumah dari gelombang pertama sampai dengan gelombang ketiga.
http://sinarharapan.co/news/read/150630094/program-bedah-rumah-ala-bupati-mesuji5#

Akan tetapi berlangsungnya program tersebut tidak selamanya berjalan mulus, ada beberapa kendala yang dihadapi oleh pihak PemerintahKabupaten Mesuji dikarenakansebagian besarmasyarakat miskin di Desa Labuhan Makmur,

Kabupaten Mesuji tidak mengambil bantuan yang telah diberikan oleh Kabupaten Mesuji, hal ini disebabkan oleh ketentuan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak Kabupaten dalampengambilan bantuan stimulant bedah rumah tersebut bagi masyarakat miskin yang memperoleh bantuan.

Diketahui bahwa bantuan tersebut dianggap sudah tepat sasaran oleh pihak Kabupaten Mesujiyang diperuntukan bagimasyarakat miskin yang terpilih, serta mempertimbangkan sejauh manaKemampuan Masyarakat Miskin Memenuhi Persyaratan Bantuan Stimulan Bedah Rumah. Kepercayaan tepat sasaran tersebutlah yang justru berdampak pada ketidakefektifan sasaran program yang secara umum dirasakan oleh masyarakat miskin yang merasa belum mendapatkan bantuan stimulan bedah rumah tersebut.

Berdasarkan jumlah Penduduk Miskindan Penerima Bantuan Stimulan di Desa Labuhan Makmur dapat kita lihat pada tabel 1 dibawah ini :

Tabel 1.2Jumlah Kepala Keluarga Miskindan Penerima Bantuan Stimulan Bedah Rumah Di Desa Labuhan Makmur, Mesuji.

Total Kepala Keluarga Desa Labuhan Makmur	**Jumlah Masyarakat Miskin**	**Penerima Bantuan Stimulan Bedah Rumah**
275 Kepala Keluarga	140 Kepala Keluarga	Gelombang 1 : 30 KK
		Gelombang 2 : 25 KK
		Gelombang 3 : 25 KK

Sumber : Data Profil Desa Labuhan Makmur, Kec. Way Serdang, Kab. Mesuji 2013.

Adapun persyaratan yang diwajibkan oleh Pemerintah Kabupaten Mesuji terhadap masyarakat miskin yang akan mengambil bantuan tersebut harusmenyediakan separuh bahan bangunan seperti bata merah, batako, kayu, dan pasir. Tanpa dapat

memenuhi persyaratan tersebut maka masyarakat miskintidak diizinkan untuk dapat mengambil bantuan stimulan bedah rumah dan dinyatakan gugur.

Bagi masyarakat miskin yang sebelumnya tidak memiliki modal dalammenyediakan separuh bahan bangunan tersebut danmerasa tidak mampu dalammemenuhi persyaratan pengambilan bantuan stimulant bedah rumah sehingga lebih memilih memutuskan untuk tidak mengambil bantuan yang telah ditetapkannya dengan memberikanya kembali kepada pihak Pemerintah Kabupaten Mesuji untuk dapat disalurkan kepada masyarakat lainnya.

Oleh sebab itu, program bedah rumah tersebut tidak dapat mencapai hasil sepenuhnya dalam menanggulangi kemiskinan dalam aspek fisik seperti tempat tinggalnyadikarenakan adanya masyarakat miskin yang tidak bersedia mengambil bantuan tersebut karena ketidakmampuanya dalam memenuhi ketentuan persyaratan, sedangkan sebenarnya bantuan tersebut sangat diharapkan. Adapun alasan mengapa Kabupaten Mesuji memberlakukan persyaratan seperti itu dikarenakan minimnya dana APBD dalam menangani program bantuan stimulant bedah rumah diseluruh Desa Se-Kabupaten Mesuji.

Agar dapat merata sehingga ditetapkannya bantuan stimulant bedah rumah berupa bahan bangunan senilai Rp. 7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah) dalam satu rumah bagi masyarakat miskin dalam program bantuan gelombang pertama, sedangkan untuk gelombang kedua senilai Rp. 12.000.000,00(Dua belas juta rupiah), serta gelombang yangke-tiga senilai Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah). Dengan selang waktu beberapa bulan dari ketiga gelombang tersebut bantuan stimulan yang didapatkan oleh masyarakat miskin berupa bahan bangunan yang telah

dipersiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Mesuji.Permasalahan inilah yang mendorong peneliti untuk mengambil penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar masyarakat miskin di Desa Labuhan Makmur yang siap dalam menyongsong dan menerima bantuanstimulan bedah rumah dengan memenuhipersyaratan yang ditetapkanbaik tingkat partisipasinya dari gelombang pertama, kedua serta gelombang ketiga. Selain itu, seberapa besarmasyarakat miskin yang memutuskan untuk tidak mengambil bantuan stimulan tersebut akibat ketidakmampuan dalam melengkapi persyaratan bantuan yang telah ditetapkan olehPemerintah Kabupaten Mesuji.Dari sini lah dapat diketahui sejauh mana program tersebut mencapai keberhasilan dalammerubah kondisi rumahmasyarakat miskin dan peningkatan kesejahteraannya. serta tindakan atau kebijakan apa yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mesuji terhadap masyarakat miskin yang memutuskan untuk tidak mengambil bantuan stimulan tersebut.

Penerima bantuan stimulan bedah rumah di Desa Labuhan Makmur, dari gelombang pertama sampai dengan gelombang ketiga berjumlah 80 KK, masing-masing gelombang pertama berjumlah: 30 KK, gelombang ke dua: 25 KK, dan gelombang ke tiga: 25 KK. Dari keseluruhan jumlah penerima bantuan tersebut yang memenuhi persyaratan 60 KK, dan yang 20 KK belum atau tidak mampu memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latarbelakang diatas, Maka rumusan masalahnya dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana caramasyarakat miskin memenuhi persyaratan bantuan stimulan bedah rumah?
2. Apakah program bedah rumah tersebut memberikan dampak kemajuan terhadap kehidupan masyarakat?
3. apa yang menjadi kendala program bantuan stimulan bedah rumah?
4. Bagaimana tingkat keberhasilan pelaksanaan program bedah rumah terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan kemampuan masyarakat miskin dalam memenuhi persyaratan bantuan stimulant bedah rumah.
2. Untuk membandingkan sebelum dan setelah program tersebut dijalankan terhadap kehidupan masyarakat miskin di Desa Labuhan Makmur, Kabupaten Mesuji.
3. Untuk menganalisis beberapa faktor yang dapat mendorong berjalannya program tersebut dan bagaimana pengaruhnya terhadap kesejahteraan hidup masyarakat miskin di Desa Labuhan Makmur, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian yang telah diungkapkan diatas, maka diharapkan penelitian ini mendatangkan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
   a. Menambah pengetahuan, pengalaman, dan wawasan tentang bagaimana pengembangan konsep-konsep mengenai pembangunan masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan strategi pemberdayaan masyarakat dan matakuliah sosiologi pembangunan .
   b. Dapat dijadikanslah satu referensi bagi peneliti berikutnya yang mengkaji permasalahan yang sama.

2. Secara Praktis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan instansi daerah setempat dalam perencanaan program-program selanjutnya yang berhubungan dengan perbaikan kualitas hidup masyarakat desa.

II.TINJAUAN PUSTAKA

A. Program Bedah Rumah (Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni)

Menurut Sulistyo, Mudji, (2013) Rumah merupakan kebutuhan dasar manusia. yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. Pada hakikatnya setiap warga masyarakat membutuhkan perumahan yang layak huni, namun dalam kenyataannya pemenuhan kebutuhan rumah layak huni tersebut menjadi masalah bagi sebagian masyarakat.

Masalah kemiskinan merupakan masalah sosial yang masih banyak dialami oleh penduduk Kabupaten Mesuji. Berdasarkan kreteria yang digunakan oleh BPS, untuk mengukur kemiskinan bahwa kondisi rumah yang tidak layak huni merupakan ciri utama untuk membedakan keluarga miskin dan keluarga tidak miskin.

Atas dasar pemikiran tersebut diatas, penyediaan rumah layak huni atau pemugaran rumah tidak layak huni dapat memberikan kontribusi terhadap upaya penurunan angka kemiskinan.

Program Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Bedah Rumah) yang di gagas oleh Pemerintah Kabupaten Mesuji berupaya menyederhanakan dari 14 kreteria yang digunakan BPS menjadi 4 kreteria diantaranya: kondisi rumah tidak

permanen dan rusak, dinding dan atap terbuat dari bahan yang mudah rusak, lantai yang masih tanah,serta keluarga yang belum memiliki tempat tinggal. dengan demikian angka tersebut diatas tidak serta merta akan mendapatkan pelayanan secara keseluruhan, namun secara selektif akan digunakan kreteria yang lebih sederhana namun lebih tepat sasaran. Program tersebut tidak lepas dari aspek program pembangunan Sai Bumi Serasan Segawe.

Pelaksanaan program Bedah Rumah memiliki korelasi positif dalam pengentasan kemiskinan yang merupakan tujuan utama dari program Sai Bumi Serasan Segawe (Satu Bumi Satu Tujuan) dalam melaksanakan program bedah rumah secara serentak.

Beberapa komponen dalam pelaksanaan program bedah rumah diantaranya:

1. **Landasan HukumProgram Bedah Rumah**
    a. Bedah Rumah adalah bantuan pemugaran/rehabilitasi bagi keluarga berumah tidak layak huni berupa bahan bangunan
    b. Keluarga berumah tidak layak huni adalah keluarga yang rumah dan lingkungannya tidak memenuhi syarat dari segi teknis dan kesehatan, yang karena kondisi sosial ekonomi tidak mampu untuk memperbaiki rumah tinggalnya
    c. Rehabilitasi rumah tidak layak huni adalah kegiatan peningkatan kesejahteraan sosial keluarga berumah tidak layak huni, dengan melakukan penyuluhan/sosialisasi dan bimbingan sosial serta perbaikan rumah.

2. Tujuan, Sasaran dan Karakteristik Program Bedah Rumah

a. Tujuan

Untuk memenuhi kebutuhan dasar terutama perumahan sebagai tempat tinggal, melalui peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat dan perbaikan/rehabilitasi rumah tidak layak huni (bedah rumah), sehingga keluarga miskin dapat menempati rumah yang layak huni dalam lingkungan yang sehat dan sejahtera.

b. Sasaran Program

Sasaran program Bedah Rumah Tidak Layak Huni adalah keluarga rumah tangga miskin dengan kreteria sebagai berikut :

1) Penduduk Kabupaten Mesuji yang memiliki KTP dan sudah menetap secara terus menerus minimal 3 tahun.
2) Kepala keluarga yang tidak memiliki penghasilan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar secara layak.
3) Status tanah dan rumah yang ditempati adalah milik sendiri, dengan dibuktikan dengan surat kepemilikan yang syah.
4) Atap rumah dalam kondisi rusak atau terbuat dari daun, dinding rumah dalam kondisi rusak atau tidak layak dan lantai dalam keadaan rusak atau kondisi lantai dari tanah, serta leas lantai kurang dari 8 m2 per-orang dan tidak memiliki MCK.

3. Mekanisme Penyaluran Bantuan Stimulan Bedah Rumah

a. Dinas Sosial menyampaikan bantuan berupa bahan bangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan, melalui pihak ketiga (rekanan) kepada

kepala keluarga yang rumahnya dinyatakan lolos seleksi dengan ditandai atau ditempel stiker.

b. Bantuan bahan bangunan diserahkan langsung kepada perima bantuan di tempat masing-masing yang pengerjaannya dilaksanakan secara swakelola dan diawasi langsung oleh pendamping teknis yang telah ditunjuk.

4. Pendamping Pelaksana

Pendamping adalah Petugas Lapangan yang memiliki kepedulian terhadap keluarga miskin berumah tidak layak huni yang didasarkan pada persyaratan yang telah ditetapkan untuk melaksanakan tugas pendampingan dalam Program Bedah RumahTidak Layak Huni, (seperti PSM: Pekerja Sosial Masyarakat,atau TKSM: Tenaga Kesejahteraan Masyarakat, Karang Taruna, Masyarakat dan lain-lain).

5. Pengawasan

Pengawasan dapat dilakukan langsung oleh masyarakat dalam rangka untuk mengetahui ketepatan sasaran, kebenaran pemanfaatan bantuan.

6. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Monitoring dan Evaluasi dilakukan untuk menilai keberhasilan mengatasi kendala pelaksanaan program. Laporan pelaksanaan dibuat oleh pendamping atau petugas yang telah ditunjuk dan disampaikan kepada Dinas Sosial sebagai bahan laporan Kepala Dinas kepada Bupati.

Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) menjalankan program bedah rumah dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat kurang mampu diseluruh indonesia. Evaluasi pembangunan perumahan rakyat berdasarkan RPJMNtahun 2012 serta rekomendasi untuk tahun 2013, Undang-undang Dasar (UUD) 1945 pasal 28-h telah mengamanatkan bahwa perumahan dan permukiman adalah hak dasar manusia, dimana setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Beberapa program perlu mendapatkan evaluasi seperti:

a. Pembangunan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa)
b. Program fasilitas rumah susun sederhana milik (Rusunami)
c. Fasilitas perumahan komersial
d. Program penataan Ruang
e. Program pengembangan kawasan permukiman

   Pada tahun 2012 dari target 126.367 unit, tercapai 87.604 unit.

   http:// people-s-housing.co.id/2013/01/ evaluasi-pembangunan-perumahan-rakyat.html

Berdasarkan RPJMN 2015-2019, tersedia dana Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembangunan rumahbaru dan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni sebanyak 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) unit.

Masalah perumahan perlu bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat pengusaha turut berperan aktif dalam program bedah rumah tersebut. Jumlah bantuan yang diberikan untuk program BSPS tersebut bervariasi mulai

dari Rp. 7.500.000,00 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) hingga Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah) tergantung kondisi rumah yang akan diperbaiki. Dengan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah maka penyaluran program bedah rumah tersebut akan mudah terealisasikankarena akan lebih memahami kondisi rumah didaerahnya.

Sebagaimana diketahui bahwa berbagaistrategi telah dilakukan oleh Pemerintahseperti pembangunan rumah sederhana sehat murah bersubsidi, pembangunan rusunawa dan rusunami bersubsidi, bantuan kredit bunga rendah dan lain sebagainya. Keterbatasan kemampuan pemerintah menyebabkan berbagai program tersebut tidak mampu menyentuh seluruh lapisan masyarakat miskin. Perilaku lingkungan hidup sehat dan kelayakan kualitas rumah merupakan kriteria yang menempati urutan teratas. Dengan kata lain kondisi Kesehatan dan rumah yang tidak layak huni merupakan ciri utama untuk membedakan Keluarga Miskin dengan keluarga tidak Miskin. Atas dasar pemikiran tersebut maka penyediaan rumah layak huni atau bedah rumah dapat memberikan jawaban terhadap upaya pengentasan kemiskinan atau menurunkan angka Kemiskinan.

Kriteria tersebut diatas yang digunakan olah Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai acuan Program Bedah Rumah. Bedah Rumah, merupakan salah satu strategi penanggulangan kemiskinan yang dimaksudkan untuk menumbuh kembangkan dan memperkuat nilai nilai kepedulian dan kesetiakawanan sosial.

Nilai-nilai tersebut merupakan kearifan lokal yang potensial untuk mendukung pembangunan kesejahteraan sosial.Rumah tidak layak huni adalah suatu hunian

atau tempat tinggal yang tidak layak huni, karena tidak memenuhi persyaratan untuk hunian baik secara tehnis maupun non tehnis.

Berdasarkan kriteria yang digunakan oleh BPS untuk mengukur kemiskinan, kriteria pertama sampai ketiga menunjukkan bahwa kondisi rumah merupakan indikator utama dalam menentukan kemiskinan. Luas bangunan berbanding dengan jumlah penghuni rumah, kelayakan kualitas bahan bangunan rumah dan kepemilikan fasilitas MCK merupakan kriteria yang menempati urutan teratas.

Kondisi rumah yang tidak layak huni merupakan ciri utama untuk membedakan keluarga miskin dengan keluarga tidak miskin. Atas dasar pemikiran tersebut maka penyediaan rumah layak huni atau pemugaran terhadap rumah tidak layak huni,dapat memberikan sumbangan yang sangat besar terhadap upaya penurunan angka kemiskinan.Adapun tahap persiapan dan pelaksanaan Program Bedah Rumah sebagai berikut:

Tahap persiapan :

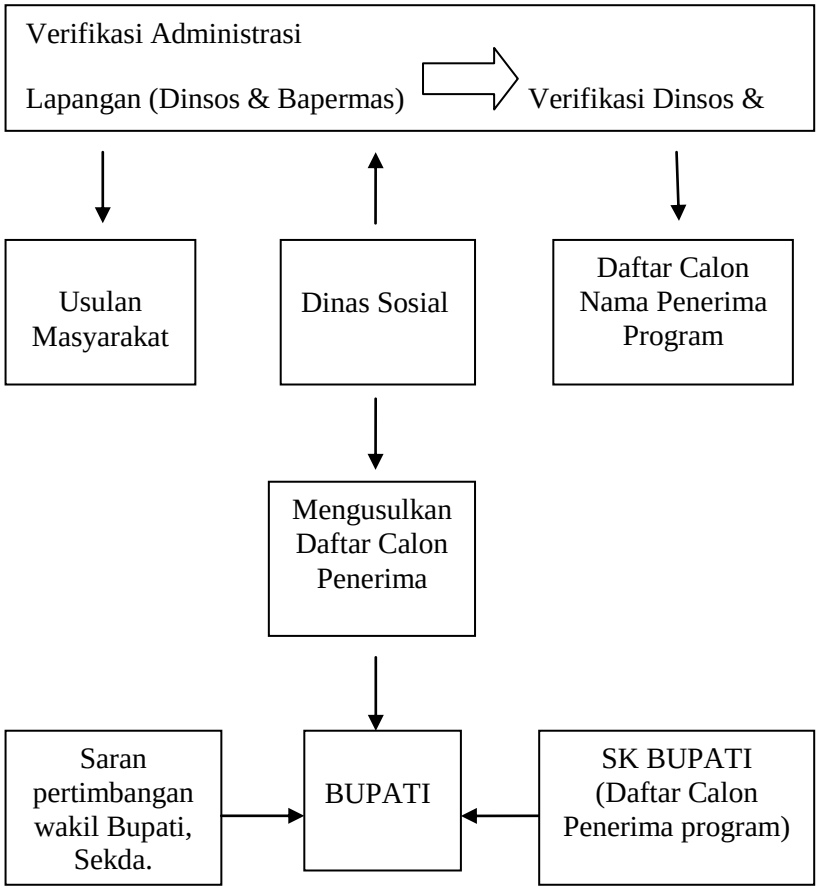

Tahap Pelaksana:

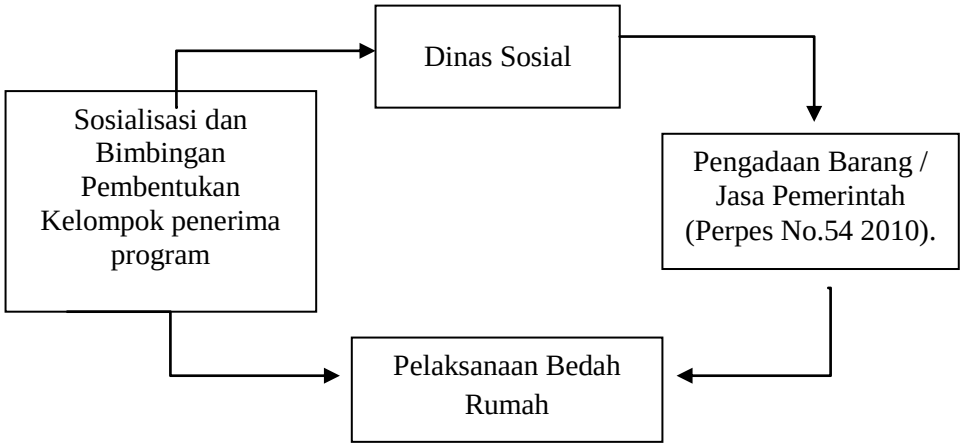

B. Konsep Rumah Layak Huni

Mubarok dan Cayatin (2008) menyebutkan bahwa rumah layak huni adalah tempat tinggal yang memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial. Kemudian menurut Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/Permen/M/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten / Kota menyatakan bahwa: rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Kriteria rumah layak huni sebagai berikut:

1. Memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, meliputi:
   a. Struktur bawah atau pondasi

      Pondasi harus ditempatkan pada tanah yang mantap dan keras, dasar pondasi diletakan lebih dalam dari 45 cm dibawah permukaan tanah, serta seluruh badan pondasi harus tertanam dalam tanah.
   b. Struktur tengah / kolom dan balak (Beam)

      Bangunan harus menggunakan kolom sebagai rangka pemikul, dapat terbuat dari kayu maupun beton, dan rangka bangunan memiliki hubungan yang kuat dan kokoh.

C. Konsep Rumah Tidak Layak Huni

Budiharjo (1994) menyebutkan bahwa rumah tidak layak huni adalah suatu hunian atau tempat tinggal yang tidak layak huni karena tidak memenuhi persyaratan untuk hunian baik secara teknis maupun non teknis. Rumah tidak

layak huni selalu berkaitan dengan aspek kemiskinan karena keterjangkauan daya beli masyarakat terhadap rumah.

Menurut Kementerian Sosial rumah tidak layak huni adalah rumah yang tidak memenuhi syarat kesehatan , keamanan dan sosial ditandai dengan kondisi sebagai berikut:

1. Luas bangunan kurang dari $8m^2$
2. Tidak permanen atau rusak
3. Dinding atau atap terbuat dari bahan yang mudah rusak atau lapuk seperti papan, ilalang, atau geribik bambu
4. Dinding dan atap sudah rusak, sehingga membahayakan untuk dihuni
5. Lantai tanah, semen dalam kondisi rusak
6. Rumah tidak memiliki fasilitas kamar mandi, dan wc.

D. Pengertian Kemiskinan

Menurut Purnomo (2013) kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang atau kelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar tersebut antara lain: terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dariu perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, serta hak untuk dapat berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik.

Bank Dunia (dalam Purnomo, 2013) mengemukakan bahwa aspek kemiskinan itu meliputi pendapatan yang rendah, kekurangan gizi, atau keadaan kesehatan yang buruk, serta pendidikan yang rendah.Bank Dunia mengukur garis kemiskinan berdasarkan pada pendapatan pendapatan seseorang kurang dari US $I *(Purchasing Power Parity)* perkapita / hari.

Kemiskinan dapat diartikan sebagai suatukeadaan dimana seseorang, keluarga atau anggota masyarakat tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara wajar sebagaimana anggota masyarakat lainya.

Mereka dikatakan berada pada garis kemiskinan apabila pendapatan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang pokok seperti sandang, pangan, dan papan. Faktor ekonomi kemudian dijadikan tolak ukur dalam menilai tingkat kemiskinan.

Emil Salim berpendapat, bahwa untuk memperbaiki nasib mereka harus adacampur tangan dari pemerintah dalam membantu mereka keluar dari garis kemiskinan. Tanpa bantuan pemerintah, maka mereka akan semakin tidak mampu merebut bagian yang lebih layak dari pendapatan nasional. Bagaimana pemerintah menjalankan kebijaksanaan sehingga dapat mengurangi bahkan meniadakan kemiskinan dan dicapai pembangunan dengan pemerataan hasil pembangunan(Abdul syani 2007).

Berdasarkan kondisi tersebut maka diperlukan kebijakan program pemerintah yang mengedepankan aspek prioritas serta dampak positif yang secara langsung dapat dirasakan oleh masyarakat miskin, sehingga semua program yang

dijalankan tepat sasaran dan mencapai keberhasilan dalam menanggulangi permasalahan kemiskinan.

1. Pengertian Masyarakat Miskin

Menurut mayor polak, masyarakat *(society)* diartikan sebagai wadah segenap antar-hubungan sosial yang terdiri atas banyak sekali kolektivitas-kolektivitas serta kelompok-kelompok yang lebih kecil atau sub kelompok. Semuanya itutersusun hierarkis (dari atas kebawah) atau berseimbangan, sejajar dan setaraf ataupun saling tembus-menembus.

Secara umum masyarakat miskin dapat diartikan sebagai masyarakat yang belum berdaya yakni masyarakat yang berada pada situasi kerentanan, keterisolasian, dan ketidak mampuan untuk melepaskan diri dari kemiskinannya.

Konsep masyarakat miskin dapat dilihat melalui indikator-indikator sebagai berikut:

a. Kondisi permukiman yang tidak layak huni
b. Penghasilan keluarga yang tidak mencukupi kebutuhan hidup atau penghasilan dibawah standar UMR
c. Tidak memiliki pekerjaan atau penghasilan yang tetap
d. Tidak memiliki modal atau ketrampilan untuk membuka usaha.

   Indikator kemiskinan pada satu rumah tangga berdasarkan ketentuan Badan Pusat Statistik sebagai berikut:

   1) Luas lantai bangunan tempat tiinggal kurang dari $8m^2$ per orang
   2) Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah, bambu atau kayu murahan

3) Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu, rumbia, kayu berkualitas rendah, atau tembok tanpa plaster
4) Tidak memiliki fasilitas buang air besar bersama-sama dengan rumah tangga lain
5) Sumber penerangan rumah tidak menggunakan listrik
6) Sumber air minum berasal dari sumur atau mata air yang tidak terlindungi, sungai dan air hujan
7) Bahan bakar untuk memasak sehari-hari menggunakan kayu bakar, arang, dan minyak tanah
8) Hanya mengkonsumsi daging atau susu atau ayam satu kali dalam seminggu
9) Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 0,5 ha, buruh tani, nelayan, buruh perkebunan atau pekerja lainya dengan pendapatan dibawah Rp.600.000 (Enam ratus ribu rupiah).
10) Pendidikan tertinggikepala rumah tangga adala tidak sekolah atau tidak tamat SD atau hanya SD

2. Penyebab Kemiskinan

Menurut Bank Dunia Tahun 2003 (dalam Septiany, 2012), penyebab dasar kemiskinan adalah : (1) kegagalan kepemilikan terutama tanah dan modal, (2) terbatasnya bahan kebutuhan dasar, sarana dan prasarana, (3) kebijakan pembangunan yang bias perkotaan dan bias sektor, (4) adanya perbedaan kesempatan diantara anggota masyarakat dan sistem yang kurang mendukung, (5) adanya perbedaan sumber daya manusia dan perbedaan antara sektor ekonomi (ekonomi tradisionalversus ekonomi modern, (6) rendahnya produktivitas dan tingkat pembentukan modal dalam masyarakat, (7) budaya hidup yang dikaitkan dengan kemampuan seseorang mengelola sumber daya alam dan lingkungannya, (8) tidak adanya tata pemerintahan yang bersih dan baik (*good government*), (9) pengelolaan sumberdaya alam yang berlebihan dan tidak berwawasan lingkungan.

Selain itu, pendapat dari Suharto dkk, 2004 (dalam Theresia, Aprilia 2014: 132) bahwa kemiskinan memiliki beberapa ciri, yaitu:

1. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang dan papan).
2. Ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi).
3. Ketiadaan jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga).
4. Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual maupun massal.
5. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan keterbatasan sumber alam.
6. Ketidakterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat.
7. Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan.
8. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental.
9. Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak terlantar, wanita korban tindak kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marjinal dan terpencil.

3. Konsep Kemiskinan

Menurut Yusuf, Edy, (2011) Konsep kemiskinan telah menarik minat politisidanintelektual pada beberapa tahun lalu. (lihat Hommerlfarb, 1984, dan Woolf, 1986).

Ada tiga konsep alternatif kemiskinantermasuk sebagai dasar untuk digunakan secara internasional. Secara prinsip adalahsusbisten, kebutuhan dasar (*basic needs*) dan depriviasi relatif (*relatif depriviatio)* (Townsend, 1993).

Konsep subsistem di definisi sebagai kemiskinan,bila pendapatan mereka tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan fisik hidup yang minimum.Suatu keluarga disebut miskin jika pendapatan dikurangi sewa berada di bawah garis kemiskinan.Tingkat pendapatan minimum merupakan pembatas antara keadaan miskin,dengan tidak miskin, atau sering disebut sebagai garis batas kemiskinan (Arsyad, 1992).

4. Ciri-ciri kelompok miskin di daerah pedesaan

Menurut M.Smith (dalam Susanto, Astrid, 1984) bahwa kelompok masyarakat miskin dicirikan sebagai berikut:

a. Hubungan antar pemimpin informal dan pengikut berdasarkan ikatan yang lama, kadang-kadang turun –temurun.
b. Pada satu pihak pengikut sangat loyal dan setia pada pemimpin tradisional dan pada pihak lain, pemimpin itu sendiri lebih berkepentingan dalam mempertahankan kedudukannya sebagai pemimpin dari pada mengusahakan perbaikan nasib pengikutnya yang miskin.
c. Pemimpin tradisional lebih cenderung sekedar memberi reaksi kepada apa yang dinilainya sebagai "ancaman" atau "saingan" dari luar dari pada mengusahakan perubahan endogen demi perbaikan didesanya.
d. Pemimpin tradisional menghindari hubungan dan saingan terbuka dengan dunia luar, karena terbiasa membina lingkungannya dalam isolasi.
e. Loyalitas kepada pemimpin tradisional, diberikan oleh pengikutnya tanpa memperhatikan ada / tidaknya jasa bagi dirinya yang telah diberikan oleh pemimpin tradisional, mengingat kedudukannya yang legitim dan kokoh dilingkungan kecilnya.
f. Hubungan pemimpin –pengikut terjalin karena hubungan tanah dan jasa yang telah diberikan dalam waktu cukup panjang, seperti:hubungan antara tuan tanah dengan penggarapnya, nelayan dengan pemilik perahu/jaring, petani dengan pengijonnya hal mana terutama ditentukan oleh ketergantungan hidup dalam alam kemiskinan, ketergantngan mana lebih bersifat mutlak.

Dapat disimpulkan bahwa pendapat M.Smith menghubungkan kemiskinan yang ditimbulkan dari pemimpin yang mempunyai kekuasaan dalam menentukan kebijakan untuk dapat menjalankan pembangunan yang mengarah terhadap kemajuan khusunya diwilayah pedesaan.

E. Perbedaan Karakteristik Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan Bantuan Stimulan Bedah Rumah

MenurutRumuat,Frenny,(2008) Salah satu program Pemerintah dalam mengurangi kemiskinan atau memajukan kesejahteraan umum adalah dengan memberikan bantuan langsung tunai. Terealisasinya bantuan ini sejak tahun 2005.

Tujuan yangdiharapkan melalui kebijakan program ini adalah dapat menjawab persoalan kemiskinan di indonesia sebagai akibat dari segenap perubahan yang terjadi, baik secara nasional maupun global sebagai suatu program dan kebijakan nasional. Program BLT mempunyai latar belakang pelaksanaan yang sistematis, baik secara deskriptif analisis kondisional maupun deskriptif operasional perundang-undangan.

Macam-macam kelemahan dari kebijakan program BLT

a. Kebijakan BLT bukan kebijakan yang efektif dan efesien untuk menyelesaikan kemiskinan di indonesia, dikarenakan kebijakan ini tidak mampu meningkatkan derajat dan tingkat kesejahteraan masyarakat miskin.
b. Efektifitas dan efisiensi penggunaan dana BLT yang tidak dapat diukur dan diawasi karena lemahnya fungsi pengawasan pemerintah terhadap kebijakan tersebut.
c. Kebijakan BLT memiliki kecenderungan menjadi pemicu konflik sosial di masyarakat.
d. Validitas data masyarakat miskin yang diragukan sehingga akan berdampak pada ketepatan pemberian dana BLT kepada masyarakat yang berhak.
e. Peran aktif masyarakat kurang atau minim, sehingga optimalisasi kinerja program yang sulit direalisasikan.
f. Dari sisi keuangan negara kebijakn BLT merupakann kebijakan yang bersifat menghambur-hamburkan uang negara karena kebijakan tersebut tidak mampu menyelesaikan masalah kemiskinan secara berkelanjutan dan tidak mampu menstimulus produktivitas masyarakat miskin.

F. Kerangka Pemikiran

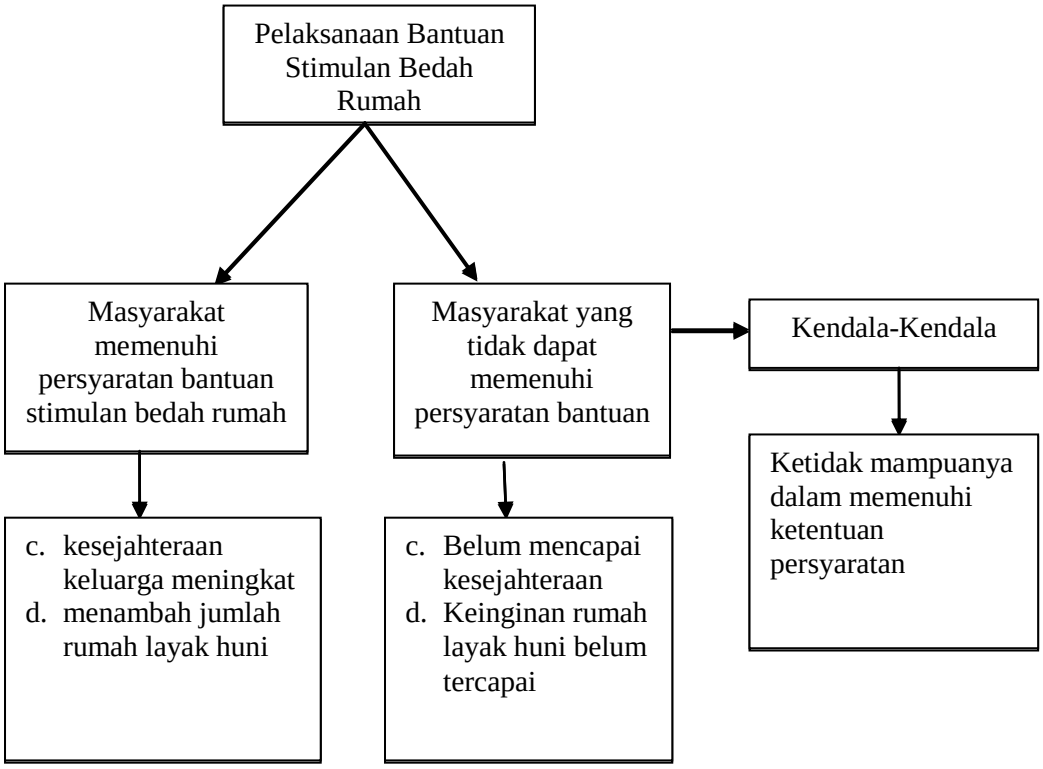

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif.

Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2011) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang perilaku yang diamati. Motode ini, diarahkan pada latar dan individu terasebut secara holistik (utuh dan menyeluruh). Holistik didasarkan pada suatu premis bahwa tidak ada sesuatu gejala apapun yang dapat menjelaskan dirinya sendiri. Pendekatan ini tidak boleh mengisolasi individu dan organisasi kedalam variabel atau hipotesis tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.

Denzin dan Lincoln (dalam Moleong (2011) mengatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mengguakan latar alamiah dengan maksud untuk mentafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian dalam ilmu pengetahuan sosial yang menggunakan latar alamiah untuk mentafsirkan fenomena yang terjadi dengan cara mendeskripsikan

dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode yang ada.

Melalui pendekatan kualitatif deskriptif penulis bermaksud memaparkan mengenai gejala-gejala yang terdapat didalam masalah penelitian yaitu Kemampuan Masyarakat Miskin Memenuhi Persyaratan Bantuan Stimulan Bedah Rumah.

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian kualitatif hal yang harus diperhatikan adalah masalah dan fokus penelitian. Fokus memberikan batasan dalam studi dan batasan dalam pengumpulan data, sehingga dalam pembatasan ini peneliti akan fokus memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan peneliti.

Menurut Iskandar (2010) pembatasan masalah melalui fokus penelitian merupakan tahap yang sangat menentukan dalam penelitian kualitatif, walaupun sifatnya masih tentatif atau sementara dan masih terus berkembang sewaktu penelitian. Menurut Licoln dan Guba, 1985 (dalam iskandar 2010) masalah dalam penelitian kualitatif perlu dibatasi melalui fokus penelitian antara lain:

1. Suatu penelitian tidak akan dimulai dari sesuatu yang vakum atau kosong tetapi berdasarkan persepsi seseorang terhadap adanya masalah. Implikasinya peneliti harus membatasi masalah melalui studi fokus.
2. Penetapan fokus penelitian dapat membatasi siapa yang ingin diteliti, karena fenomena-fenomena atau gejala-gejala itu bersifat holistik atau luas, dalam hal ini fokus penelitian akan membatasi masalah penelitian.

3. Fokus penelitian berfungsi memenuhi kriteria suatu informasi yang diperoleh di lapangan.
4. Fokus penelitian masih bersifat tentatif atau sementara dan dapat berkembang sewaktu dalam latar penelitian.

Adapun yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian antara lain:

1. masyarakat miskin yang memenuhi persyaratan dan tidak memenuhi persyratan bantuan stimulan bedah rumah
2. Dampak keberhasilan Program Stimulan Bedah Rumah
3. Kendala yang menjadi dasar terhambatnya program bantuan stimulan bedah rumah
4. Tingkat keberhasilan pelaksanaan program bedah rumah terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin

C. Lokasi Penelitian

Menurut Nasution (2003) lokasi penelitian menunjukkan pada pengertian tempat atau lokasi sosial penelitian yang dicirikan oleh adanya tiga unsur yaitu pelaku, tempat dan kegiatan yang dapat diobservasi.Penelitian yang akan dilaksanakan di Desa Labuhan Makmur, Kab. Mesuji mengenai Kemampuan Masyarakat Miskin Memenuhi Persyaratan Bantuan Stimulan Bedah Rumah sebagai lokasi penelitian dikarenakan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Karena lokasi sebagai salah satu penerima bantuan stimulan bedah rumah
2. Karena peneliti ingin mengetahui peran bantuan stimulan bedah rumah terhadap kehidupan masyarakat miskin

D. Teknik Penentuan Informan

Menurut Sanafiah Faisal (dalam Sugiyono, 2014) yang mengutip pendapat Spradley bahwainforman harus memiliki beberapa kriteria yang perlu dipertimbangkan yaitu :

1) Informan menyatu dengan kegiatan atau aktivitas yang menjadi perhatian penelitian dan ini ditandai oleh kemampuan memberikan informasi diluar kepala tentang sesuatu yang ditanyakan.
2) Informan aktif dalam lingkungan dan kegiatan yang menjadi perhatian penelitian.
3) Informan yang memiliki waktu yang cukup memadai untuk dimintai informasi.
4) Informanyang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil kemasannya sendiri.

Adapun dari penjelasan diatas maka informan dalam penelitian ini dipilih dalam beberapa kriteria yang sebagai berikut :

a. Masyarakat Desa Labuhan Makmur yang mendapatkan bantuan stimulan bedah rumah
b. Masyarakat yang mendapatkan bantuan tetapi tidak dapat memenuhi persyaratan bantuan.
c. Kepala Desa dan Dinas Sosial selaku pelaksana program stimulan bedah rumah.

Jadi, berdasarkan kriteria yang telah dijelaskan diatas teknik yang digunakan pada penelitian ini adalah *Purposive Sampling*, artinya dengan memilih informan yang benar memahami dan terlibat dalam pelaksanaan bedah rumah sehingga data dan informasi yang diperoleh akurat.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

   Teknik wawancara merupakan teknik pengumpulan data kualitatif dengan menggunakan instrumen yaitu pedoman wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi melalui tanya jawab secara langsung dengan narasumber atau responden yang diteliti untuk melengkapi data yang diperlukan. Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Seperti yang ditegaskan oleh Lincoln dan Guba (1985) dalam Moloeng (2011), maksud diadakannya wawancara untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organsasi, perasaan, motivasi, tuntunan , kepedulian tentang situasi sosial (*setting social)*. Teknik wawancara yang dilakukan oleh peneliti dalam mencari data dilapangan dengan mengunjungi rumah masyarakat miskin penerima bantuan yang telah ditetapkan sebagai informan dengan cara berbincang – bincang mengenai bantuan stimulan bedah rumah berdasarkan panduan wawancara yang telah ditentukan. Dari hasil wawancara maka akan didapatkan jawaban dari hasil pertanyaan yang akan menjadi hasil dari penelitian.

Adapun pihak pihak yang akan dijadikan informan untuk diwawancarai antara lain:

a. Masyarakat Desa Labuhan Makmur yang mendapatkan bantuan stimulan bedah rumah
b. Masyarakat yang mendapatkan bantuan tetapi tidak dapat memenuhi persyaratan bantuan
c. Kepala Desa dan Dinas Sosial Kabupaten Mesuji.

2. Observasi

Obseravasi merupakan metode pengumpulan data dengan melihat langsung atau mengikuti secara tidak langsung. Adapun obsevasi partisipan merupakan observasi ikut serta yang dimaksud ialah mengikuti kegiatan yang dilakukan. Metode ini dimaksud sebagai pelengkap untuk menguatkan data yang diperoleh melalui metode wawancara serta metode dokumentasi. Tahap observasi ini, peneliti terlebih dahulu memahami lokasi penelitian secara langsung, dan memahami kondisi masyarakat di Desa Labuhan Makmur, Kecamatan Way Serdang Mesuji, sebelum melakukan penelitian. Dengan dilakukannya observasi, peneliti akan lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial, jadi akan diperoleh pandangan yang holistik atau menyeluruh.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan alat pengumpulan data secara otentik. Dokumen dokumen yang dimaksud adalah dokumen pribadi, dokumen resmi, referensi referensi, foto foto ataupun rekaman kaset. Dari proses dokumentasi maka

didalam hasil penelitian ini akan dicantumkan keterangan gambar pada hasil proses wawancara maupun disertakan di dalam lampiran.

F. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data yang terkumpul dari lapangan, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dimana data dan informasi diperoleh dari lapangan dideskripsikan secara kualitatif, dengan membentuk kalimat kalimat dengan menggunakan langkah langkah yang diterapkan oleh miles dan Huberman A. Michael dengan menggunakan langkah langkah sebagai berikut: (1) redukasi data; (2) display/ panyajian data; dan, (3) mengambil kesimpulam lalu dari verifikasi (pembuktian kebenaran).

1. Redukasi data merupakan proses pengumpulan data penelitian, selama proses redukasi data dapat dilakukan kegiatan menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tak perlu dan memilih bagian yang penting sesuai dengan masalah penelitian.
2. Penyajian data merupakan kegiatan untuk menyusun informasiyang memberi kemungkinanadanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
3. Mengambil keputusan merupakan kegiatan lanjutan dari redukasi data dan penyajian data sehingga data yang diperoleh dapat disimpulkanyakni den menggambarkan maksud dari data yang ditampilkan.

   Dalam penelitian ini, teknik analisis data dimulai dari data profil dan monografi desa untuk mengetahui gambaran umum lokasi penelitian, selanjutnya memasukan data mengenai jumlah penerima bantuan stimulan bedah rumah.

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Desa Labuhan Makmur

Desa Labuhan Makmur Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji awalnya merupakan pemekaran dari Desa Labuhan Baru pada tahun 2008, penduduk aslinya berasal dari Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) Daerah Padang Ratu Lampung Tengah Dan Lampung Timur.

Pada tahun 1995 ada program Pemerintahan khususnya transmigrasi, warga yang berada dikawasan Daerah Lampung yang terdiri dari daerah kawasan :

1. Dari Padang Ratu
2. Dari Gunung Balak

Proses mempercepat pemerataan pembangunan disegala bidang, maka Kepala Desa Labuhan Baru (Bapak Sujono) mempunyai gagasan untuk pemekaran Desa Labuhan Baru menjadi 2 (dua) Desa karena wilayahnya terlalu luas.

Berdasarkan dukungan dari berbagai pihak, pada tanggal 30 desember 2008 resmi berdiri Desa Labuhan Makmur. Desa Labuhan Makmurberbatasan dengan:

a. Sebelah Utara Berbatasan Dengan : Desa Labuhan Baru
b. Sebelah Barat Berbatasan Dengan : Sungai Menggala c Sp 08

c. Sebelah Selatan Berbatasan Dengan :Desa Tri Tunggal Jaya

d. Sebelah Timur Berbatasan Dengan :Desa Pancawarna

B. Letak Geografis Desa Labuhan Makmur

Desa Labuhan Makmur merupakan salah satu desa yang termasuk dalam wilayah kerja Kecamatan Way Serdang yang berjumlah 20 desa. Jarak Desa Labuhan Makmur ke Kecamatan berkisar 14 Km. Iklim atau musim Desa Labuhan Makmur sebagaimana umumnya daerah Kecamatan Way Serdang yang beriklim tropis dan mempunyai dua musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Musim tersebutlah yang berpengaruh terhadap hasil pertanian atau perkebunan di Desa Labuhan Makmur.

C. Luas Areal Desa Labuhan Makmur

Tabel 4.1. Luas Areal Desa Labuhan Makmur

PERUNTUKAN TANAH	LUAS TANAH
Tanah Pekarangan	269 Ha
Tanah Kosong	13 Ha
Tanah Jalan	15 Ha
Tanah Pemakaman	10 Ha
Tanah Peladangan	430 Ha
Tanah Fasilitas Pembangunan Desa	18 Ha
Total	755 Ha

(Sumber : Monografi Desa Labuhan MakmurTahun 2014)

Berdasarkan tabel 4.1, menunjukan bahwa tanah peladangan paling luas, sedangkan tanah pemakaman memiliki ukuran paling kecil. Tabel luas areal ini dicantumkan karena sebagai pendukung keterangan jumlah penduduk Desa Labuhan Makmur dan mata pencaharian penduduk.

D. Potensi Sumber Daya Manusia

1. Umur

Berikut adalah Tabel jumlah warga Desa Labuhan Makmur yang berusia kurang dari 1 tahun sampai lebih dari 60 tahun:

Tabel 4.2. Jumlah Penduduk Usia <1 Tahun sampai >60 Tahun

Umur	**Jumlah (orang)**
<1 tahun	20
1-10	60
11-20	74
21-30	108
31-40	120
41-50	155
51-58	62
Lebih dari 59 tahun	49
Total	648 jiwa

(Sumber : Monografi Desa Labuhan Makmur Tahun 2014)

Dari tabel 4.2 diketahui bahwa yang paling banyak jumlahnya adalah warga yang berusia antara 41-50 tahun,sedangkan usia yang paling sedikit jumlahnya adalah warga yang berusia kurang dari 1 tahun. Dari tabel diatas, menerangkan bahwa sebagian besar masyarakat di Desa Labuhan Makmur, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji menuju usia yang kurang produktif. Potensi sumber daya manusia berdasarkan umur dicantumkan didalam gambaran umum lokasi penelitian karena mempunyai keterkaitan dengan judul penelitian.

2. Pendidikan

Tingkat pendidikan di Desa Labuhan Makmur terdiri dari warga yang belum sekolah, tamat SD, tamat SLTP, tamat SLTA, sampai tamat perguruan tinggi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.3. Tingkat Pendidikan Penduduk Berdasarkan Umur

Umur	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
<1 tahun	Belum Sekolah	20
1-10	Sama sekali tidak pernah sekolah	25
1-10	Sedang Sekolah	35
11-15	Tidak tamat SD	30
11-15	Tamat SD	63
16-20	Tamat SLTP	60
16-20	Tidak Tamat SLTP	28
20-25	Tamat SLTA	30
20-25	Tidak Tamat SLTA	95
26-30	Tamat D1	2
26-30	Tidak Tamat D1	102
31-35	Tamat D2	1
31-35	Tidak Tamat D2	120
36-40	Tamat D3	1
36-40	Tamat S1	2
≥ 41-59	Tidak Diketahui	35orang
Total		648 jiwa

(Sumber : Monografi Desa Labuhan Makmur Tahun 2014)

Dari tabel 4.3 diatas menunjukan bahwa tingkat pendidikan warga di Desa Labuhan Makmur berdasarkan umur yaitu: < 1 berjumlah 20, umur 1-10

sedang sekolah 35, umur 11-15 tamatan SD 63, umur 16-20 tamat SLTP 60, umur 20-25 tamat SLTA 30, umur26-30 tamat D12, umur31-35 tamat D2 1, dan umur 36-40 tamat S1 2, serta > 41-59 tidak diketahui berjumlah 35.

3. Mata Pencaharian Pokok

Tabel 4.4. Mata Pencaharian Pokok Kepala Keluarga

Mata Pencaharian Pokok	**Jumlah**
Petani	186
Pedagang	15
PNS	1
Karyawan	3
Jasa	10
Buruh	60
Total	275

(Sumber : Monografi Desa Labuhan Makmur Tahun 2014)

Dari tabel 4.4 diatas menunjukan bahwa sebagian besar warga bermata pencaharian sebagai Petani yaitu sebanyak 186 orang. Sedangkan mata pencaharian pokok yang paling rendah adalah PNS yang hanya berjumlah 1 orang. Tabel mata pencaharian ini menjelaskan bahwa adanya keterkaitan dengan judul penelitian yang penulis teliti, mengingat sebagian besar masyarakat di Desa Labuhan Makmur, Kecamatan Way Serdang,Kabupaten Mesuji mayoritas seorang petani, oleh sebab itu faktor penunjang ekonomi masyarakat hanya berdasarkan hasil perkebunan maupun peladangan. Hal ini tentunya berkaitan dengan kemampuan masyarakat miskin dalam memenuhi persyaratan bantuan stimulan bedah rumah sesuai dengan judul penelitian.

4. Agama

Agama yang dianut oleh warga Desa Labuhan Makmur terdiri dari agama Islam, dan Hindu.

Tabel 4.5. Jumlah Penduduk menurut Agama

Agama	Jumlah
Islam	600 jiwa
Hindu	48 jiwa
Total	648 jiwa

(Sumber : Monografi Desa Labuhan Makmur Tahun 2014)

Dari tabel 4.5 diatas mununjukan bahwa mayoritas warga Desa Labuhan Makmur Beragama Islam sejumlah 600 jiwa, sedangkan warga yang memeluk agama Hindu hanya 48 jiwa. Data ini diperlukan sebagai komponen pelengkap mengenai kondisi atau keadaan yang ada dilapangan, dan sebagai penunjang pada Bab gambaran Lokasi Penelitian.

E. Potensi Kelembagaan

1. Lembaga Kemasyarakatan

Lembaga kemasyarakatan di Desa Labuhan Makmur terdiri dari PKK, Organisasi Pemuda, Karang taruna, Majelis Ta,klim. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.6. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan

Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Anggota
PKK	22
Organisasi Pemuda	30
Organisasi Karang Taruna	25
Majelis Ta’lim	30
Total	107

(Sumber : Monografi Desa Labuhan Makmur Tahun 2014)

Dari tabel 4.6 tersebut menunjukan bahwa warga di Desa Labuhan Makmur lebih banyak mengikuti Organisasi pemuda dan Majelis Ta'lim yaitu sebanyak 30 orang, sedangkan yang paling sedikit di ikuti adalah PKK sebanyak 22 orang.

F. Kelembagaan Ekonomi

Kelembagaan ekonomidi Desa Labuhan Makmurterdiri dari industri usaha perdagangan, Lapak Karet, Warung Sembako, Bengkel.

Tabel 4.7. Jumlah Kelembagaan Ekonomi

Kelembagaan Ekonomi	Jumlah
Industri Usaha Perdagangan	5
Lapak Karet	7
Warung Sembako	8
Bengkel	3
Total	23

(Sumber : Monografi Desa Labuhan Makmur Tahun 2014)

Dari tabel 4.7 tersebut menunjukan bahwa kelembagaan ekonomi warga di Desa Labuhan Makmur sebagian besar adalah Warung sembako sebanyak 8, sedangkan yang paling sedikit jumlahnya adalah Bengkel sebanyak 3. Dari jumlah keseluruhan lembaga ekonomi yang ada menyesuaikan dengan jumlah penduduk di Desa Labuhan Makmur, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji.

G. Prasarana Kesehatan

Kesehatan merupakan aspek terpenting didalam kehidupan masyarakat, serta keberadaan sarana dan prasarana kesehatan sangat dibutuhkan dalam menunjang kehidupan masyarakat untuk dapat hidup sehat dan sejahtera.

Prasarana kesehatan yang ada di Desa Labuhan Makmur terdiri dari Posyandu, Puskesdes, serta Tempat Praktek Bidan.

Tabel 4.8. Jumlah Prasarana Kesehatan

Prasarana Kesehatan	**Jumlah**
Posyandu	1 Unit
Puskesdes	1 Unit
Tempat praktik Bidan	1 Unit
Total	3 Unit

(Sumber: Monografi Desa Labuhan Makmur 2014)

Dari tabel 4.8 menunjukan bahwa prasarana Kesehatan di Desa Labuhan Makmur keseluruhan hanya berjumlah 1 unit. Terlihat bahwa kesadaran masyarakat tentang kesehatan masih rendah karena minimnya prasarana kesehatan di Desa Labuhan Makmur.

H. Ekonomi Masyarakat

1. Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di Desa Labuhan Makmur terdiri dari keluarga pra sejahtera, sejahtera 1, sejahtera 2, sejahtera 3, dan sejahtera 1 plus. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.9. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Kemiskinan

Tingkat Kemiskinan	Jumlah
Kepala Keluarga	275 Kepala Keluarga
Keluarga Pra Sejahtera	94 Keluarga
Keluarga Sejahtera 1	95 Keluarga
Keluarga Sejahtera 2	30 Keluarga
Keluarga Sejahtera 3	33 Keluarga
Keluarga Sejahtera Plus	23 Keluarga
Total	275 Keluarga

(Sumber : Monografi Desa Labuhan Makmur 2014)

Berdasarkan pada tabel 4.9, menjelaskan bahwa dari keseluruhan jumlah kepala keluarga yang tergolong keluarga pra sejahtera berkisar = 94 keluarga, keluarga sejahtera 1= 95 keluarga, keluarga sejahtera 2=30 keluarga, keluarga sejahtera 3= 33 keluarga, dan keluarga sejahtera plus= 23 keluarga. Dari tabel tersebut, maka berhubungan dengan judul penelitian penulis mengenai kemampuan masyarakat dalam memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan program bedah rumah.

2. Penguasaan Aset Ekonomi Oleh Masyarakat

Penguasaan aset ekonomi oleh masyarakat di Desa Labuhan Makmur terdiri dari Aset Rumah, Aset Usaha Ekonomi, dan Aset Memiliki Kendaraan. Berikut tabel rincianya:

Tabel 4.10. Jumlah Penduduk Labuhan Makmur Menurut Penguasaan Aset Ekonomi Non Pertanian

Penguasaan Aset Ekonomi	**Jumlah**
Aset Rumah	
Memiliki Rumah Sendiri	204 Kepala Keluarga
Tidak Memiliki Rumah / Ngontrak	71 Kepala Keluarga
Aset Usaha Ekonomi	
Memiliki Usaha Ekonomi	12 Kepala Keluarga
Aset Memiliki Kendaraan Motor	
Memiliki Motor	90 Kepala Keluarga
Tidak Memiliki Motor	185 Kepala Keluarga
Aset Memiliki Kendaraan Mobil	
Memiliki Mobil	2 Kepala Keluarga

(Sumber: Monografi Desa Labuhan Makmur 2014)

Dari tabel 4.10 tersebut diketahui bahwa warga di Desa Labuhan Makmuryang memiliki aset rumah sendiri sebesar 204 Kepala Keluarga, sedangkan warga yang tidak memiliki rumah / ngontrak sebanyak 71 Kepala Keluarga,Warga yang memiliki aset usaha ekonomi sebanyak 12 kepala keluarga, Warga yang memiliki kendaraan motor berjumlah 90 kepala keluarga dan Kepala Keluarga yang tidak memiliki motor berjumlah 185,sedangkan yang memiliki kendaraan mobil hanya berjumlah 2 kepala keluarga. Penguasaan Aset Ekonomi perlu dicantumkan dalam penelitian ini karena sebagai gambaran kondisi keadaan didalam masyarakat Desa Labuhan Makmur, dengan diketahui jumlah aset ekonominya.

I. Lembaga Pendidikan

Berdasarkan kondisi di Desa Labuhan Makmur, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji masih minimnya infrastruktur, serta merupakan desa pecahan sehingga keberadaan lembaga pendidikan sangat dibutuhkan, meskipun hanya terdapat lembaga pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) dan Lembaga pendidikan Sekolah Dasar (SD).

Berikut adalah tabel lembaga pendidikan yang ada di Desa Labuhan Makmur:

Tabel 4.11. Jumlah Lembaga Pendidikan

Lembaga Pendidikan	**Jumlah**
Jumlah TK	1
Jumlah SD/ Sederajat	1
Total	2 Lembaga

(Sumber : Monografi Desa Labuhan Makmur 2014)

Dari tabel 4.11 tersebut diketahui bahwa lembaga pendidikan yang ada di Desa Labuhan Makmur adalah TKsebanyak 1 unit, SD/Sederajat berjumlah 1 unit. Data diatas menunjukan bahwa di Desa labuhan Makmur hanya mempunyai 2 lembaga pendidikan yaitu TK dan SD. Untuk Lembaga Pendidikan kejenjang SLTPberada di Desa Labuhan Baru.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian terhadap kesepuluh informan dan kedua Informan pendukung tentang kemampuan masyarakat miskin dalam memenuhi persyaratan bantuan stimulan bedah rumah di Desa Labuhan Makmur, Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan masyarakat miskin di Desa Labuhan Makmur, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji memenuhi persyaratan bantuan stimulan bedah rumah yang telah ditetapkan dikarenakan sebagian besar masyarakat sudah mempunyai kesiapan dalam menyambut program dari pemerintah berupa bahan-bahan bangunan, sebagian juga sangat antusis sehingga memutuskan untuk mengambil bantuan tersebut. Sehingga program tersebut dapat memberikan kontribusi positif terhadap kehidupan masyarakat miskin di Desa Labuhan Makmur, dan menjadi salah satu program pembangunan yang secara langsung dapat dirasakan oleh masyarakat miskin. Bahkan masyarakat mengharapkan bahwa program bantuan seperti bedah rumah harus terus dilakukan.
2. Alasan masyarakat miskin tidak memenuhi persyaratan bantuan stimulan bedah rumah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Mesuji

dikarenakan belum adanya kesiapan bahan-bahan bangunan. Hal ini disebabkan oleh faktor ekonomi. Dimana masyarakat merasa kesulitan dalam memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, sehingga menurunkan semangat masyarakat dalam menanggapi program tersebut dan memilih untuk tidak memenuhi persyaratan tersebut. Akan tetapi mengulas tanggapan dari beberapa informan yang tidak mampu memenuhi persyaratan bantuan stimulan bedah bahwa sebenarnya bantuan tersebut sangat diharapkan dan dibutuhkan oleh masyarakat diDesa Labuhan Makmur, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji.

3. Kendala yang mempengaruhi pengambilan bantuan stimulan bedah rumah yang dirasakan oleh masyarakat miskinsalah satunya adalah karena ditetapkannya persyaratan, sedangkan masyarakat belum memiliki kesiapaan akan hal itu, meskipun bantuan tersebut sangat diharapkan serta dibutuhkan oleh masyarakat miskin. Kendala inilah yang menjadi salah satu permasalahan yang tentunya harus segera dicarikan solusi yang tepat serta kebijakan dari pemerintah mengenai kondisi masyarakat miskin.

   Solusi yang diberikan oleh masyarakat cukup membantu pemerintah kabupaten mesuji dalam melakukan evaluasi program bantuan dengan melakukan pengawasan maupun peningkatan kinerja dari instansi terkait guna menanggapi permasalahan yang terjadi. Sehingga terjalinnya kerjasama yang intensif antara pemerintah dengan masyarakat dalam menciptakan kemajuan, dan kemakmuran bagi masyarakat desa.

4. Dari berlangsungnya bantuan stimulan bedah rumah baik dari gelombang pertama, kedua maupun ketiga setidaknya telah membawa perubahan yang positifbagi kehidupan masyarakat miskin, dimana program pembangunan yang berbasis pemberdayaan sangat diperlukan. Oleh sebab itu program semacam ini perlu dijalankan secara berkala guna pengentasan kemiskinan penduduk dan pemerataan pembangunan.
5. Belum sepenuhnya mencapai keberhasilan, mengingat ada berbagai permasalahan yang muncul pada saat penyaluran bantuan stimulan bedah rumah yang justru berasal dari salah satu oknum Aparatur Desa yang memiliki fungsi dalam memimpin proses berjalannya program bantuan tersebut.

B. Saran-Saran

Dari beberapa uraian yang telah disimpulkan sebelumnya maka peneliti dapat memberikan beberapa hal yang perlu dijadikan saran:

1. Perlu kesadaran dari masyarakat bahwa adanya ketentuan persyaratan bukan semata-mata ingin memberatkan akan tetapi Pemerintah Kabupaten Mesuji mempertimbangkan keefektifan sasaran dana bantuan sehingga tidak terjadi penyimpangan.
2. Perlunya sikap saling perduli antar masyarakat, baik masyarakat yang berhasil memenuhi persyaratan maupun masyarakat yang tidak mampu memenuhi persyaratan guna menciptakan persatuan dan kesatuan.
3. Keberhasilan program merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya dari pihak Pemerintah Kabupaten Mesuji tetapi juga perlu bantuan beserta dukungan dari seluruh elemen masyarakat.

4. Kepada Pemerintah Kabupaten Mesuji diharapkan dapat meneruskan program pembangunan yang berbasis pemberdayaan masyarakat, dalam memajukan kehidupan masyarakat desa serta tindakan dalam mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Mesuji.
5. Perlu dilakukan evaluasi dilapangan pada saat penyaluran program bantuan apapun, hal ini diperlukan karena sebagai cara dalam menanggulangi terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh oknum tertentu, sehingga dapat merugikan masyarakat.
6. Perlu dipertegas mengenai landasan hukum dan ketentuan dalam proses penyaluran bantuan, sehingga tidak akan muncul permasalahan mengenai penyimpangan-penyimpangan yang tidak di inginkan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Budiharjo,Eko. 1994. *Sejumlah Masalah pemukiman Kota*. Alumni. Bandung

Iskandar. 2008. *Metodologi penelitian pendidikan dan sosial (kuantitatif dan kualitatif).* Jakarta: GP press

Mubarok dan Cayatin. 2008. *Ilmu Kesehatan Masyarakat:Teori dan Aplikasi*. PT Salemba Medika Gresik

Moleong, Lexy J. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Roasdakaraya

Nasution, S. 2003. *Metode Penelitian Naturalistik Inkuiri*. Bandung: Tarsito

Ndraha, Taliziduhu. 1990. *Pembangunan Masyarakat : Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas* . Jakarta: Rineka Cipta

Sanderson, K. Stephen. 1995.*Sosiologi Makro*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Sugiyono, 2014, Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R & D, Bandung: Alfabeta.

Susanto, Astrid, 1984. *Sosiologi Pembangunan*. Jakarta: Bina Cipta

Soekanto, Soerjono. 2012.*Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers

Syani, Abdul. 1987.*Sosiologi skematika,teori, dan terapan.* Jakarta: Bumi Aksara

Theresia, Aprilia dkk. 2014. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfabeta

JURNAL

Purnomo, Heri. 2013. *Teknik Penetapan Garis Kemiskinan Untuk Menghitung Jumlah Penduduk Miskin.* http://banten.bps.go.id. Diakses pada tanggal 1 November 2015

Rumuat, Frenny. 2008. *Implementasi kebijakan bantuan langsung tunai di kelurahan kakenturan dua kecamatan maesa kota bitung*. Volume 01, No 01,(1-8) diakses tanggal 29 oktober 2015

Sulistyo,Mudji. 2013.*Implementasi Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor46 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Rehabilitasi Rumah Tidak LayakHuni Di Kabupaten Kutai Kartanegara*. Volume 01, No 01, (328-341) di aksestanggal 27 september 2015.

Yusuf, Edy. 2011. *Analisis Kemiskinan Dan Pendapatan Keluarga Nelayan Kasus Di Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Indonesia.*Volume 01, No 01, (51-52) di akses tanggal 27 september 2015.

SKRIPSI

Septiany, Toina. 2012. *Analisis Pemanfaatan Air Sungai Way Kuripan Oleh Masyarakat Miskin*. Universitas Lampung:Bandar Lampung.

INTERNET

Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Mesuji.2014.Bantuan Bedah Rumah. http://sinarharapan.co/news/read/150630094/program-bedah-rumah-ala-bupati-mesuji5#. Diakses tanggal 18 desember 2015.

http:// people-s-housing.co.id/2013/01/ evaluasi-pembangunan-perumahan-rakyat.html. Diakses tanggal 25 november 2015.

http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1494

http://TNP2K (Seswapres) Mesuji dalam angka 2011

Http://duniaiptek.com/indikator-keluarga-sejahtera/

Http://comdevmaros./2013/03/Tinjauan-konsep-communitdevelopment.html?m=1